

Anak dan Generasi Indonesia Aman Dalam Naungan Islam

Sri Barliani Wati

Setiap tanggal 23 Juli kita mengadakan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Tahun 2026 peringatan HAN mengusung tema "*Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan*". Melalui Gerakan Nasional **#RuangAmanNyamanAnak (Gernas RANA)** diharapkan semakin memperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

Namun, di balik tema yang penuh harapan itu, fakta menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa keamanan anak masih menjadi persoalan yang sangat serius. Kasus kekerasan terhadap anak terus saja bermunculan. Anak-anak mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga perundungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun ruang digital. Ironisnya, anak tidak hanya menjadi korban, tetapi dalam sejumlah kasus juga menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap sesamanya. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar lemahnya pengawasan atau kurangnya edukasi.

Data Simponi PPA tahun 2025 mencatat telah terjadi 15.396 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan didominasi kasus kekerasan seksual ([Dataloka, 15/01/2026](#)). Kekerasan terhadap anak masih tetap terjadi sampai bulan April tahun 2026 sudah tercatat 426 kasus kekerasan terhadap anak ([mpr.go.id, 19/05/2026](#)). Menurut data dari Federasi Serikat Guru Indonesia ([FSGI](#)) kekerasan di lingkungan sekolah meningkat tajam hampir 100% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025 ([VOI, 14/07/2026](#)). Kasus kekerasan terhadap anak beragam yang ditandai dengan melonjaknya laporan kasus perundungan (bullying), pelecehan seksual, serta berbagai fenomena baru yang mengancam keselamatan fisik dan mental anak. Lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia ([KPAI](#)) dan Federasi Serikat Guru Indonesia ([FSGI](#)) terus menyuarakan alarm keras terkait semakin runtuhnya ruang aman bagi anak di lingkungan rumah, sekolah, maupun digital.

Ruang aman bagi anak semakin sempit, bahkan lingkungan yang seharusnya aman bagi tumbuh kembang anak malah menjadi tempat yang merusak masa depan mereka. Ruang aman seperti rumah, sekolah, lingkungan keluarga bahkan pondok pesantren juga mengikis rasa aman bagi anak.

Orang-orang yang seharusnya melindungi dan menjaga anak-anak kita hari ini juga bisa menjadi predator buat mereka. Predator anak semakin banyak di lingkungan terdekat anak, fakta menunjukkan ada seorang ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak juga tetangga dekat yang seharusnya melindungi mereka.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan anak, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan anak misalnya UU No 23 tahun 2002, UU No 35 tahun 2014, UU No 17 tahun 2016 dan yang terbaru UU No 1 tahun 2023. Semua UU tersebut

mengatur tentang perlindungan anak yang bertujuan memberikan rasa aman bagi anak. Namun regulasi tersebut sering kali dipandang belum efektif, karena semakin banyak kekerasan yang terjadi pada anak dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan.

Di ruang digital juga tidak kalah membahayakan bagi keamanan anak misalnya, konten yang dinilai merusak perkembangan anak masih mudah diakses. Praktik perjudian daring, pornografi, hingga berbagai bentuk eksploitasi digital terus menjadi ancaman. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak maupun penanganan anak yang terlibat dalam tindak kriminal dinilai belum memberikan efek jera, akibatnya kasus serupa terus saja berulang.

Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari penerapan sistem kehidupan sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Ketika nilai-nilai agama tidak lagi menjadi landasan dalam membentuk pola pikir dan pola sikap terhadap individu maupun masyarakat, maka kebebasan (liberalisme) menjadi ukuran perilaku. Liberalisme semakin mengikis nilai-nilai moral menjadikan individu serba permisif, berbuat serba bebas mengikuti keinginan.

Ruang digital berkembang tanpa kendali sehingga anak-anak mudah terpapar konten kekerasan, pornografi, perjudian daring, hingga berbagai budaya yang merusak akidah dan akhlak. Akibatnya, sebagian anak tumbuh sebagai korban, sementara sebagian yang lain terdorong menjadi pelaku kekerasan.

Dalam perspektif ini, akar persoalan juga dipandang terletak pada sistem kapitalisme yang menjadikan perlindungan anak tidak berjalan secara utuh. Keluarga menghadapi tekanan ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kualitas pengasuhan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Masyarakat semakin individualistis sehingga fungsi amar makruf nahi munkar melemah. Sementara itu, negara dinilai lebih banyak menghadirkan program-program yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi belum menyentuh akar persoalan yang melahirkan kekerasan terhadap anak.

Islam menawarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh. Dalam konsep pemerintahan Islam, negara dipandang memiliki fungsi sebagai **raa'in** (pengurus rakyat) dan **junnah** (pelindung), sebagaimana dipahami dalam literatur fikih siyasah berdasarkan hadis Nabi ﷺ. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap jiwa, fisik, akal, kehormatan, dan akidah setiap anak. Negara tidak hanya bertugas menangani akibat dari suatu kejahatan, tetapi juga membangun sistem yang mencegah lahirnya kejahatan sejak awal.

Islam juga memberikan aturan berupa sistem pergaulan yang bertujuan menjaga kehormatan dan keamanan masyarakat. Pendidikan berbasis akidah Islam diarahkan untuk membentuk kepribadian yang bertakwa sehingga anak memiliki benteng moral dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Pada saat yang sama, keluarga didorong menjalankan fungsi pendidikan pertama dan utama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk saling menasihati dan menjaga lingkungan sosial agar tetap kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Selain pembinaan, Islam mengenal sistem sanksi yang dipandang tegas terhadap pelaku kejahatan. Dalam pandangan Islam, penerapan sanksi yang memberikan efek jera diyakini menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keamanan masyarakat, termasuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Adanya kepastian hukum dan penegakannya yang konsisten, diharapkan angka kejahatan dapat ditekan dan dicegah sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman.

Karena itu, sudah semestinya peringatan Hari Anak Nasional tidak berhenti hanya pada slogan, kampanye, atau kegiatan seremonial semata. Perlindungan anak dan generasi membutuhkan sistem kehidupan yang mampu membentuk individu yang beriman dan bertakwa, keluarga yang kuat, masyarakat yang peduli, serta negara yang menjalankan fungsi perlindungannya secara menyeluruh. Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dan komprehensif untuk menyelesaikan kekerasan terhadap anak. Semua itu hanya dapat diwujudkan melalui penerapan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan sehingga anak-anak benar-benar memperoleh perlindungan yang hakiki dan dapat tumbuh menjadi generasi penerus peradaban Islam.